

ANALISIS TINGKAT KETANGGUHAN BENCANA KELURAHAN KASTELEA KOTA TERNATE (Studi Kasus Pandemi Covid 19)

Marwan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Khairun

Article Info

Article history:

Accepted: 28 Januari 2022

Publish: 28 Januari 2022

Keywords:

Tangguh Bencana dan Covid-19

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kesiapan pemerintah di Kelurahan Kastela di dalam menghadapi setiap potensi bencana yang terjadi. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yakni model pendekatan yang dilakukan untuk menjawab sebuah fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakat dengan mengkonstruksinya kemudian mencoba menelusuri akar permasalahannya berdasarkan fakta yang ditemukan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa, 1) Tingkat ketangguhan bencana Kelurahan Kastela tergolong masih sangat rendah sehingga belum masuk kepada kategori pratama. Hal ini karena hampir semua aspek yang diukur belum terpenuhi; 2) Salah satu aspek yang sangat penting yakni legislasi dinilai oleh responden bahkan dipersepsi sama sekali belum dilakukan apa pun pada semua item yang diukur sehingga diberikan nilai 0. Padahal pada aspek ini dianggap sebagai salah satu dasar untuk melakukan aspek lainnya; 3) Aspek yang lainnya juga terkategori sangat rendah bahkan beberapa aspek juga oleh responden secara tegas diberikan nilai 0, artinya bahwa pemerintah di tingkat Kelurahan Kastela belum melakukan apapun juga; 4) Tingkat ketangguhan Kelurahan Kastela yang belum baik tersebut berdampak terhadap penanganan Covid 19 banyak menghadapi permasalahan di lapangan. Bahkan hingga pada saat ini di tahun kedua pandemic ini belum dapat berjalan dengan baik. Seperti pada program vaksinasi yang belum berjalan sesuai dengan target pemerintah.

Article Info

Article history:

Accepted: 28 Januari 2022

Publish: 28 Januari 2022

ABSTRAK

The purpose of this study is to determine the readiness of the government in Kastela Village in dealing with any potential disasters that occur. This research was conducted with a qualitative approach, namely an approach model that is carried out to answer a phenomenon that occurs in the community by constructing it and then trying to trace the root of the problem based on the facts found. The results of the study revealed that, 1) The level of disaster resilience of Kastela Village is still very low so it has not yet entered the primary category. This is because almost all the aspects measured have not been met; 2) One very important aspect is that the legislation is assessed by respondents and it is even perceived that nothing has been done on all items measured so that it is given a value of 0. Whereas in this aspect it is considered as one of the bases for carrying out other aspects; 3) Other aspects are also categorized as very low, even some aspects are also explicitly given a score of 0, meaning that the government at the Kastela Village level has not done anything yet; 4) The level of resilience of the Kastela Village which has not been good has an impact on the handling of Covid 19. problems in the field. Even now, in the second year of this pandemic, it has not been able to run well. As in the vaccination program that has not run according to the government's target.

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Corresponding Author:

Marwan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Khairun

email: marwan.jamaluddin@yahoo.co.id

1. PENDAHULUAN

Letak posisi Indonesia yang berada pada jalur *ring of fire* atau biasa disebut juga dengan cincin api, menyebabkan wilayah Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki potensi yang sangat tinggi terhadap terjadinya gempa bumi dan bencana alam lainnya. Menyadari adanya potensi bencana tersebut seharusnya mendorong kita untuk melakukan berbagai langkah-langkah untuk dapat melakukan antisipasi secara dini. Termasuk dalam hal ini adalah pemerintah dengan berbagai kebijakannya dalam pembangunan. Seperti dilakukannya penataan kawasan pemukiman bagi masyarakat di wilayah yang dianggap paling aman. Sementara itu bagi daerah yang memiliki potensi yang sedang perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian tertentu dalam penyediaan infrastruktur guna untuk dapat memberikan perlindungan secara dini. Termasuk juga menyediakan desain penanganan jika telah terjadi bencana. Sementara itu, untuk daerah yang dianggap memiliki potensi ancaman bencana yang sangat tinggi, harus dinyatakan sebagai daerah terlarang untuk dijadikan sebagai wilayah pemukiman yang bersifat permanen.

Pulau Ternate, yang terletak di kaki Gunung Gamalama yang merupakan gunung api aktif juga termasuk pada daerah yang rawan terhadap terjadinya berbagai bencana alam. Diantaranya adalah bencana gunung meletus, gempa, banjir, tanah longsor, angin topan, dan tsunami. Berbagai jenis bencana ini memang sangat erat kaitannya dengan letak geografis wilayah Kota Ternate yang hamper seluruhnya hanya menampati daerah kaki gunung Gamalama. Oleh karena itu tofografis lahan menjadi yang hamper semuanya berbentuk landai.

Kelurahan Kastela di Kecamatan Pulau Ternate merupakan sebuah pemukiman yang berada pada lingkaran luar pulau, maka secara umum letak kelurahan ini berada di dataran yang lebih rendah. Oleh karena itu pada musim hujan selalu mendapat limpahan hujan dari hulu. Sehingga sangat rentan bagi terjadinya banjir. Selain itu, Kelurahan Kastela bersama dengan beberapa kelurahan lainnya di wilayah pulau Ternate masuk ke dalam wilayah yang memiliki ancaman tsunami yang cukup besar. Sebab kelurahan-kelurahan tersebut langsung berhadapan dengan laut lepas.

Widayatun dan Fatoni (2013:38) menyatakan bahwa banyaknya bencana alam yang terjadi di Indonesia memberikan dampak dan pengaruh terhadap kualitas hidup penduduk yang dapat dirasakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu dampaknya langsungnya adalah jatuhnya korban jiwa, hilang dan luka-luka. Sedangkan dampak tidak langsung antara lain adalah terjadinya banyak kerusakan-kerusakan bangunan perumahan penduduk, sarana sosial seperti bangunan sekolah, rumah sakit dan sarana kesehatan lainnya, perkantoran dan infrastruktur jalan, jembatan, jaringan listrik dan telekomunikasi. Sehingga dengan demikian, terjadinya bencana alam mengakibatkan adanya kerugian ekonomi bagi penduduk, seperti kerusakan lahan pertanian dan kehilangan mata pencaharian, terutama bagi penduduk yang bekerja disektor in formal.

Salah satu bencana yang terbaru dan terbilang fenomenal saat ini yaitu berupa wabah penyakit menular Covid 19. Tercatat hanya dalam waktu yang sangat singkat, yakni sekitar 3 bulan sejak diidentifikasi di Wuhan China pada akhir desember 2019 dan pada sekitar akhir februari telah menyebar secara luas, termasuk ke seluruh wilayah Indonesia. Penyebarannya yang sangat cepat dan dampaknya yang sangat mematikan menyebabkan terjadinya kepanikan kepada semua pihak, termasuk pemerintah pemerintah dan masyarakat di seluruh dunia. Oleh karena itu, badan kesehatan dunia (WHO) menggolongkan wabah ini sebagai pandemi global karena melanda hampir di seluruh dunia.

Berbagai langkah-langkah awal telah dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan pada rekomendasi dari pemerintah pusat melalui instansi terkait. Upaya tersebut dilakukan di dalam rangka melakukan pencegahan bagi terjadinya penyebaran yang lebih luas lagi. Berbagai aktifitas yang dianggap memiliki potensi tinggi bagi terjadinya penularan segera ditiadakan. terutama bagi kegiatan yang merupakan yang menjadi pusaran untuk berkumpulnya orang banyak. Diantaranya diliburkannya semua aktifitas perkantoran pemerintah dan digesernya kegiatan yang dapat dilaksanakan dari rumah yang kemudian dikenal dengan sebut *Work From Home* (WFH) kecuali

pada beberapa instansi yang tidak dapat diliburkan seperti rumah sakit, kepolisian, dan beberapa unit yang sifatnya kedaruratan, sekolah-sekolah dan kampus pun ikut diliburkan. Bahkan terdapat yang lebih ekstri yakni dilakukannya pembebasan sebagian tahanan dalam rangka mengurangi para napi.

Protokol kesehatan juga diterapkan secara ketat pada instansi pemerintah dan swasta yang tetap menjalankan layanan publik. seperti diwajibkannya bagi setiap instansi untuk menyediakan tempat cuci tangan, diwajibkannya penggunaan masker, dan secara ketat dilakukannya pemeriksaan suhu tubuh bagi para pengunjung. Sebagian masyarakat melakukan pencegahan mandiri dengan membeli sendiri berbagai alat yang diyakini dapat membantu seperti masker dan hand sanitaizer. Kondisi ini belakangan malah menyebabkan munculnya persoalan lain, yakni terjadinya kelangkaan berbagai alat kesehatan di masyarakat yang tentu saja menyebabkan kenaikan harga yang tidak rasional.

Tujuan pengurangan risiko adalah untuk merancang dan membuat konteks untuk mengurangi kerugian manusia dan melindungi aset dari bahaya alam, Blaikie dkk. 2014; Dowrick 2009 dalam Valibeigi *et all* (2019:2). Selanjutnya, oleh karena itu Disaster Risk Management (DRM) terdiri dari berbagai kegiatan sebelum, selama dan setelah bencana, dilakukan untuk meminimalkan kerentanan dan risiko bencana di seluruh masyarakat, untuk menghindari atau membatasi dampak buruk dari bahaya, dalam konteks luas pembangunan berkelanjutan dan memperhatikan dimensi seperti partisipasi, penguatan sinergi dan pengetahuan, pemberdayaan dan meningkatkan kapasitas, memperbaiki lingkungan fisik dan kemampuannya (ISDR 2005; Kohler, Julich & Bloemertz 2004; Thomalla *et al.* 2006), Valibeigi (2019:2).

Oleh karena itu perlu adanya penelitian untuk mengetahui kesiapan daerah di dalam menghadapi terjadinya bencana dalam rangka melakukan tindakan pengurangan risiko menghadapi setiap potensi bencana. Oleh sebab itu penelitian ini akan memotret pemahaman dan kesediaan partisipasi masyarakat, serta kesiapan pemerintah di dalam menghadapi setiap bencana yang terjadi.

Rumusan Masalah

“Bagaimana kesiapan Kelurahan Kastela Kota Ternate di dalam menghadapi setiap potensi bencana yang terjadi Untuk mengetahui kesiapan pemerintah di dalam menghadapi setiap potensi bencana?”

2. METODE PENELITIAN

Metode dan Tahapan analisis Kualitatif

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Yakni model pendekatan yang dilakukan untuk menjawab sebuah fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakat dengan mengkonstruksinya kemudian mencoba menelusuri akar permasalahannya berdasarkan fakta yang ditemukan. Berdasarkan penelusuran tersebut selanjutnya akan ditemukan solusi yang akan dapat digunakan untuk menjawab fenomena tersebut. Untuk menganalisis data yang diperoleh secara kualitatif tersebut digunakan metode Model Interaktif. Menurut Huberman dan Miles (Idrus, 2007:180-184), model interaktif terdiri atas tiga hal utama yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Analisis Data

Data akan dianalisis dengan menggunakan acuan pada Peraturan Kepala (Perka) Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di dalamnya memuat tentang ketentuan dan klasifikasi desa/kelurahan tangguh bencana sebagai berikut:

- a. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Utama (Skor 51 - 60)
- b. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Madya ((Skor 36 - 50)
- c. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Pratama (Skor 20 - 35)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian

Untuk mendapatkan data, maka berikut profile para responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Profile Informan Penelitian

No.	Nama	Jabatan
1	Lutfi Kadir	Lurah
2	Suraida Buka	Staf Kelurahan
3	Sunardi Suminta	Staf Kelurahan
4	Zulfikar Hi. Radjab	Staf Kelurahan
5	Bunadri Hi. Hasan	Staf Kelurahan
6	Maryam Hi. Hamzah	Staf Kelurahan

Berdasarkan pada table 1 di atas nampak bahwa yang menjadi responden di dalam penelitian ini adalah orang yang dianggap sangat memiliki pemahaman yang sangat terhadap topic penelitian sebab, keenamnya adalah orang yang berada pada penanganan birokrasi di tingkat kelurahan Kastela, termasuk ada program-program yang terkait dengan bencana alam. Yakni terdiri atas satu orang lurah dan 5 orang staf kelurahan. Berikut adalah tanggapan mereka terhadap terhadap tingkat ketangguhan bencana Kelurahan Kastela berdasarkan pada kuisisioner penelitian.

Tabel 2 Hasil Data Tanggapan Responden

No.	Nama	Legislasi	Perencanaan	Kelembagaan	Pendanaan	Pengemb. Kapasitas	Penyelengg Penanggn Benc
1	Lutfi Kadir	0	0	1	3	8	23
2	Suraida Buka	0	0	0	1	0	7
3	Sunardi Suminta	0	1	1	1	0	7
4	Zulfikar Hi. Radjab	0	0	0	1	0	7
5	Bunadri Hi. Hasan	0	0	0	1	0	7
6	Maryam Hi. Hamzah	0	0	0	1	0	7
	Total	0	1	2	8	8	58

Berdasarkan pada table 2 tersebut di atas, Nampak bahwa secara umum semua responden memberikan jawaban masih sangat rendah pada semua aspek. Seperti diketahui bahwa kuisisioner penelitian ini terdiri atas 6 aspek penanganan bencana yang secara keseluruhan terdiri atas 60 item penelitian. Selengkapnya jawaban responden adalah sebagai berikut:

Aspek Legislasi

Berdasarkan pada Tabel 2, tersebut di atas nampak bahwa 6 orang responden memberikan penilaian bahwa pada aspek legislasi yang terdiri atas 3 item pemerintah di kelurahan Kastela sama sekali belum melakukan apapun. Hal ini secara umum menunjukkan bahwa dari aspek legislasi kelurahan yang menjadi kajian dari penelitian belum siap. Padahal dalam hal penanggulangan bencana aspek legislasi merupakan satu hal yang sangat kerusial sebab seperti diketahui bahwa masalah kebencanaan merupakan sebuah hal yang bersifat darurat, sehingga sifat penanganannya lebih dominan bersifat kebijakan. Lebih lanjut terkait hal ini disampaikan oleh Buchari (2020:8), Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah menjadi penanggungjawab penyelenggaraan penanggulangan bencana. Akibatnya adalah para lurah belum memiliki legal formal yang akan dijadikan sandaran di dalam melakukan kegiatan yang 1160 / *Analisis Tingkat Ketangguhan Bencana Kelurahan Kastela Kota Ternate (Studi Kasus Pandemi Covid 19)* (Marwan)

terkait dengan kebijakan di dalam penanganan bencana. Termasuk dalam hal ini adalah dasar untuk membuat perencanaan tentang pengembangan konsep penanganan bencana. Itu sebabnya penanganan yang dilakukan saat ini masih sangat bersifat reaktif ketimbang pro aktif. Hal ini tentu sangat riskan sebab saat ini berbagai bencana sangat sangat berpotensi untuk terjadi, kapan pun.

Nursyabani, Putera, dan Kusdarini (2020:84) menyatakan bahwa mitigasi ini mencakup langkahlangkah regulasi, program pendidikan, modifikasi perilaku serta pengendalian lingkungan. Untuk melaksanakan mitigasi bencana yang baik tidak hanya membutuhkan kesadaran dari mahasiswa itu saja, melainkan juga dibutuhkan pengetahuan dan kesadaran terkait manajemen bencana misalnya dengan memahami bagaimana menerapkan langkahlangkah mitigasi.

Aspek Perencanaan

Pada aspek perencanaan yang merupakan sebuah bagian krusial di dalam penanggulangan bencana, sebab merupakan sebuah gambaran tentang bagaimana sebuah wilayah memandang dan sekaligus melakukan berbagai proses sebuah wilayah melakukan persiapan atau kesiapsiagaan dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan terjadinya bencana. Hasil pada table di atas Nampak bahwa pada aspek ini pun persepsi para responden masih sangat rendah, yakni dari 6 orang responden untuk aspek perencanaan dengan 3 item hanya 1 orang yang memberikan 1 angka. Artinya apa yakni bahwa pada umumnya para responden yang note bene adalah perangkat di pemerintahan Kelurahan Kastela measih memandang bahwa belum dilakukan perencanaan yang baik terkait dengan kebencanaan, itu juga sekaligus memberikan gambaran bahwa belum ada upaya-upaya untuk menyusun perencanaan untuk dapat mengantisipasi atas terjadinya berbagai bencana. Hal ini tentu saja sebuah kondisi yang sangat riskan bahwa mengingat wilayah ini juga terkategori pada wilayah yang cukup rawan terhadap beberapa bencana alam, baik yang sifatnya kecil, sedang, maupun yang besar.

Aspek Kelembagaan

Dari hasil survey yang dilakukan pada penelitian ini diperoleh hasil seperti Nampak pada table di atas, bahwa dari 9 item yang diajukan kepada para responden hanya 2 responden yang memberikan persetujuan, hal ini menunjukkan bahwa pada aspek ini masih sangat kecil upaya yang telah dilakukan. Bahkan juga dapat dikatakan bahwa belum ada sama sekali upaya yang telah dilakukan. Dapat dibayangkan jika dengan kondisi seperti ini terus berlangsung sementara sewaktu-waktu terjadi kondisi bencana, maka pasti terjadi kelambatan penanganan oleh karena tingkat ketergantungan kepada pemerintah atau instansi terkait sangat besar.

Dengan temuan seperti tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah di tingkat Kelurahan Kastela belum cukup mempersiapkan aspek ini secara baik dalam kaitan dengan membentuk wilayahnya menjadi sebuah wilayah yang tangguh di dalam menghadapi berbagai kemungkinan bencana yang akan terjadi. Tentu saja banyak sebab yang akan mengarah kepada temuan ini. Diantaranya tingkat pemahaman tentang masalah kebencanaan, kesadaran segenap perangkat kelurahan dan masyarakat sekitar, atau juga bahkan kepedulian yang belum baik.

Aspek Pendanaan

Pada aspek ini terdapat 6 item yang harus direspon oleh para responden. Dari survey yang telah dilakukan pada 6 orang responden 1 orang telah memberikan angka 3 yang artinya bahwa terdapat 3 item yang dianggap telah terpenuhi. Sementara itu pada 5 orang lainnya meniali bahwa terdapat 1 item yang telah terpenuhi. Secara keseluruhan hasil ini manunjukkan bahwa pada aspek belum juga cukup upaya yang telah dilakukan sehingga kontribusi aspek pendanaan ini terhadap tingkat ketangguhan bencana masih rendah.

Padahal untuk aspek ini dimaksudkan bahwa setiap kelurahan telah memiliki sumber pendanaan secara tetap dan berkelanjutan terkait dengan berbagai upaya penanganan terhadap

bencana. Sumber tersebut bisa bersumber dari anggaran kelurahan sendiri maupun dengan melibatkan partisipasi masyarakat yang ada di lingkungan tersebut. Mekanisme ini belum berjalan dengan baik, sebab belum terbangunnya system dalam hal aspek pendanaannya, oleh karena pengelolaannya belum dilakukan secara khusus oleh badan maupun kelompok yang ada. Sehingga belum dilakukan sebagai sebuah bentuk antisipasi terhadap terjadinya bencana, pada umumnya dilakukan jika telah terjadi bencana dan bersifat sporadic, biasanya dilakukan oleh kelompok pemuda dengan cara mengumpulkan bantuan dari masyarakat dengan cara mengunjungi rumah-rumah masyarakat dan meminta untuk dapat berpartisipasi. Bahkan terkadang dilakukan dengan melakukan pengumpulan di jalan-jalan dengan cara menggugah partisipasi masyarakat dalam hal membantu masyarakat yang tengah mengalami masalah tersebut, cara ini sesungguhnya selain, bersifat rekatif juga memiliki resiko karena rawan untuk mengundang bencana bagi para pemuda tersebut. Biasanya juga model seperti ini agak telat di dalam memberikan bantuan, selain itu, metode seperti ini sulit untuk dapat dilakukan secara transparan.

Aspek Pengembangan Kapasitas

Pada aspek ini terdiri atas 15 item yang harus direspon oleh para responden. Jumlah ini terbilang besar sebab mencakup seperempat dari total instrument. Hal ini mengindikasikan bahwa aspek ini dianggap sebagai salah satu bagian yang penting. Pada Kelurahan Kastela hasil survey menunjukkan bahwa dari 6 orang responden hanya 1 orang responden yang memberikan tanggapan bahwa terdapat 8 item yang telah terpenuhi namun pada 5 responden lainnya tidak satu pun dari 15 item tersebut yang dinilai telah terpenuhi. Sehingga secara umum hasil survey ini mengungkapkan bahwa kelurahan Kastela sama sekali siap dalam aspek pengembangan kapasitas terkait dengan pembangunan kelurahan tangguh bencana.

Aspek Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Untuk kelurahan Kastela pada hasil survey yang telah dilakukan menunjukkan bahwa tingkat kesiapan kelurahan tersebut pada aspek ini, masih sangat rendah. Hal ini terlihat dari hasil survey pada 6 responden riset, hanya 1 orang yang menyatakan bahwa terjadi rasio 23/24, yakni menyatakan bahwa dari 24 item telah terpenuhi 23. Namun pada 5 orang responden lainnya masing-masing memberikan rasio 7/24, yaitu hanya menjawab bahwa terpenuhi 7 dari total 24 item pengukuran.

4. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Dengan temuan seperti di atas maka secara umum dapat dirangkumkan terhadap keenam aspek yang dijadikan indicator di dalam penetapan tingkat ketangguhan sebuah wilayah, desa maupun kelurahan terhadap bencana, maka dapat dirangkumkan di dalam table 2, sebagai berikut:

Aspek Legislasi

Aspek legislasi merupakan bagian pertama dalam Perban BNP No. 12 Tahun 2012, dalam mengukur tingkat ketangguhan sebuah desa maupun kelurahan. Hal ini menunjukkan bahwa begitu pentingnya aspek legislasi dalam penyusunan kebijakan terkait dengan permasalahan kebencanaan. Oleh karena seperti diketahui bahwa persoalan kebencanaan merupakan peristiwa yang bersifat darurat, maka harus disiapkan berbagai regulasi terkait penyusunan kebijakan dan tata cara penanganannya. Oleh sebab itu lingkup birokrasi setingkat kelurahan juga harus melakukan pemenuhan kelengkapan aspek ini. Dengan ketersediaan perangkat tersebut maka setiap langkah penanganan yang dilakukan merupakan sebuah rangkaian yang tersistem dan dapat dipertanggungjawabkan. Tidak hanya merupakan sebuah tindakan rekatif yang sifatnya sporadic.

Sebaliknya, ketidaksiapan pada aspek ini akan menyebabkan penanganan kebencanaan akan bersifat lamban dan terjadi saling lepas tanggung jawab. Pengalaman dalam hal penanganan Covid 19 yang paada akhir tahun 2019 lalu. Seperti yang diungkapkan oleh Marwan (2020: 8), bahwa ketidaksiapan dalam sebuah regulasi akan ini menjadi sebuah jawaban atas semua spekulasi yang

terjadi atas berbagai reaksi dan sikap aparat dan masyarakat di berbagai kelurahan di Kota Ternate dalam tahap awal penanganan Covid 19. Salah satu cara untuk memperbaiki regulasi tentang kebencanaan adalah melalui kerja sama internasional, oleh karena itu kepentingan Indonesia khususnya BPBD NTT sendiri dalam kerja sama dengan DFAT Australia ini adalah adanya regulasi yang dihasilkan, yang akan sangat bermanfaat bagi Indonesia kedepannya. Yang selanjutnya juga disampaikan bahwa NTT juga merasa terbantu khususnya dalam hal regulasi sebab regulasi menjadi dasar pelaksanaan suatu program kegiatan termasuk penanggulangan bencana, Panorama, Nastiti, dan Anfasa (2021:238).

Penyebaran virus yang cepat juga diperparah dengan adanya pergerakan penyebaran informasi di masyarakat lewat berbagai informasi media social yang saat ini merupakan rujukan utama masyarakat dalam memperoleh berbagai informasi. Meskipun cepat, tetapi tidak adanya proses sortir terhadap berbagai informasi tersebut menyebabkan masyarakat terpaksa harus mengkonsumsi yang belum tentu memiliki kebenaran. Hal ini menyebabkan munculnya beragam sikap masyarakat terhadap wabah covid tersebut. Dalam hal ini juga menunjukkan bahwa lemahnya sector regulasi menyebabkan tidak adanya upaya yang cukup menjadi landasan dalam menertibkan berbagai informasi di masyarakat.

Salah satu bukti kuat tentang lemahnya penanganan covid 19 di kelurahan Kastela yang disebabkan oleh lemahnya sector regulasi adalah tidak adanya dasar hukum yang dapat dijadikan oleh pemerintah untuk dapat memaksa masyarakat dalam hal penertiban masyarakat. Aparatur pun hanya bisa untuk menghimbau masyarakat untuk dapat menaati berbagai ketentuan yang dianggap dapat untuk mencegah penyebaran wabah C-19 tersebut. Sementara tidak semua masyarakat patuh terhadap berbagai ketentuan tersebut. Tidak jarang malah muncul perlawanan. Akibatnya adalah masyarakat sangat susah untuk ditertibkan. Demikian juga pada pelaksanaan program pemerintah yang dilakukan untuk dapat menghentikan wabah ini, yaitu program vaksin nasional.

Hal lain yang dirasakan menjadi alasan yang lebih urgen bagi ketersediaannya regulasi pada tingkat desa dan kelurahan adalah dalam masa pandemic dan masa sulit lainnya adalah sering munculnya berbagai perilaku yang sifatnya oportunistis. Seperti yang terjadi dalam kegiatan perdangan di masa awal pandemic ini, yaitu perilaku sebagian masyarakat yang mencari untung tanpa memperhatikan pada kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat lainnya.

Seperti pada umumnya pada setiap terjadinya masalah social di masyarakat, termasuk juga pada peristiwa bencana alam akan menyebabkan terjadinya ketidaknormalan di dalam berbagai hal. Termasuk di dalam distribusi logistic. Hal ini pada gilirannya akan membawa pada ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan. Akibatnya adalah akan mendorong pada peningkatan harga jual di masyarakat. Kondisi ini diperparah dengan factor psikologis di masyarakat baik sebagai penjual maupun pada posisi pembeli. Yakni akan memunculkan perilaku penimbunan barang-barang oleh para penjual. Kurangnya keputusan berbasis ilmu pengetahuan, penggunaan larangan perjalanan *ad-hoc*, dan tanggapan lain yang tidak diinformasikan dan tidak terkoordinasi, memperburuk wabah ini baik sebagai krisis kesehatan maupun krisis ekonomi, Djalante, Shaw, dan DeWit (2020 : 5)

Aspek Perencanaan

Nasrullah, Paripurno, dan prasetyo (2021:31), bahwa Untuk kesuksesan suatu proses maka perlu adanya suatu konsep perencanaan strategis dan perencanaan implementasi (rencana aksi) yang jelas. Selanjutnya, Menurut Lestari (2007) Perencanaan sektoral terdiri atas; (1) Sektor manajemen dan koordinasi atau komunikasi (2) Sektor kesehatan (3) Sektor sarana prasarana (4) Sektor logistik. Mengingat penelitian ini menyangkut pengelolaan logistik bencana maka penulis hanya menjelaskan sektor logistik meliputi sasaran dan kegiatan.

Salah satu bukti tentang minimnya perencanaan adalah pada saat pandemi telah terjadi pemerintah pada semua daerah di Indonesia baru mulai melakukan penyiapan tempat untuk menjadi pusat isolasi bagi para warga yang tertular secara langsung. Akibatnya adalah untuk kasus di

Ternate adalah munculnya penolakan yang hamper merata dari semua masyarakat yang direncanakan lungkungannya akan menjadi pusat isolasi. Akibatnya adalah pemerintah dan tim gugus tugas melakukan isolasi pada beberapa hotel yang tentunya akan memiliki dampak pada biaya penanganan yang mahal. Pada jaman pemerintahan orde baru dahulu pada setiap desa didesain sebuah gedung yang disebut balai desa. Bangunan ini selanjutnya menjadi bangunan serba guna untuk kegiatan-kegiatan kemasyarakat di desa tersebut. Mulai dari tempat sosialisasi berbagai program-program pemerintah maupun pusat pemerintahan, dan lain-lain hajatan yang dilakukan untuk masyarakat desa.

Aspek Kelembagaan

Dalam kaitan dengan pelembagaan itu menunjukkan bahwa diharapkan bahwa masyarakat luas yang terdapat pada setiap desa maupun kelurahan seyogyanya telah merupakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah setempat dalam kaitan dengan penanganan bencana. Oleh sebab itu mereka harus diorganisir di dalam wadah organisasi dan dilibatkan secara aktif di dalam berbagai bentuk kegiatan. Ini juga sebagai upaya untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat di lingkungannya berada terhadap satu hal yang krusial, yakni kemungkinan terjadinya bencana alam.

Pradika, Giyarsih, dan Hartono (2018:268) menyatakan bahwa Peran pemuda dalam pengurangan Risiko bencana di Desa Kepuharjo dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, sosialisasi dan pelatihan PRB. Kedua, pemetaan partisipatif. Kerja kolaboratif antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan pemuda sebagai elemen masyarakat yang selanjutnya adalah pemetaan partisipatif dengan tujuan untuk menghasilkan visualisasi bahaya dan risiko bencana agar lebih mudah dipahami oleh berbagai kalangan masyarakat Kepuharjo. Ketiga, simulasi atau gladi lapangan. Keempat, pemantauan dan komunikasi. Kelima, radio komunitas. Keenam, konservasi dan pelestarian.

Cameron dan Steven (2020:2) mengungkapkan bahwa dalam penanggulangan bencana, normalisasi adalah penyeragaman aturan, standar praktik, dan tujuan pengurangan resiko bencana yang dapat secara luas diterapkan keseluruh masyarakat. agar efektif, normalisasi dilegitimasi melalui penggunaan para ahli, yang dalam konteks penanggulangan bencana di Australia, para ahli ini dibuktikan dengan berkonsultasi dengan organisasi riset ilmiah dan industry kekayaan bersama serta kepala layanan darurat Negara, universitas, dan lembaga akademik lainnya. Melalui legitimasi inilah normalisasi menjadi alat pendukung rezim biopolitik.

Seperti halnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Korea, seperti berikut Pemerintah Seoul dan Gyeonggi-do, dengan populasi tertinggi di Korea, mengambil tindakan proaktif dari wabah awal. Pemerintah Kota Seoul segera membuat dan mendistribusikan pedoman tentang prosedur masuk khusus yang merinci diagnosis dan tip pencegahan untuk virus korona, dan untuk sementara membatasi penggunaan kotak publik besar (Shaw; Kim; Hua : 2020:8)

Pada beberapa penelitian ini terkait juga dengan budaya nasional kita seperti yang telah dilakukan oleh Geer Hofstede, tentang budaya nasional yang membagi dimensinya dalam lima dimensi. Pada salah satu dimensinya yaitu uncertainty avoidance menempatkan Indonesia pada posisi low cenderung ke moderat. Yang artinya bahwa penghindaran terhadap ketidakpastian kita itu tergolong rendah. artinya kita lebih cenderung menerima terhadap kondisi ketidakpastian atau lebih menerima kondisi demikian.

Aspek Pendanaan

Pada aspek pendanaan, hamper tidak ditemukan sebuah kelurahan di lingkungan Kota Ternate yang telah memiliki sebuah mekanisme pendanaan yang berasal dari swadaya masyarakat secara rutin. Untuk itu, jika terjadi suatu bencana hal yang dilakukan adalah dilakukannya iuran atau bahkan baru dibentuk tim pengumpul dana. Untuk itu, satu hal yang perlu dilakukan terkait dengan pelembagaan tersebut di atas adalah termasuk didalamnya adalah pembentukan mekanisme pendanaan yang berasal dari masyarakat secara rutin. Untuk itu, perlu dilakukan sebuah pemetaan

masyarakat dari status ekonominya untuk dapat lebih mudah dilakukan pengumpulan. Hal ini perlu dilakukan agar dapat diperkirakan kemampuan masing-masing masyarakat dalam berkontribusi langsung terkait penyediaan anggaran tersebut. Selain itu, tentunya dari pihak pemerintah di tingkat kelurahan juga diharapkan adanya penganggaran secara rutin atas masalah ini.

Sadat (2019:72) menyampaikan bahwa oleh Tim Peneliti Balitbang dan Akademisi, menggambarkan bahwaterkait dengan pendanaan terdapat dua alternative yaitu Risiko bencana yang relatif kecil, sering terjadi dan dapat diprediksi seperti banjir, longsor dan kekeringan dapat dibiayai dari sumber-sumber dana cadangan yang dianggarkan secara rutin. Sedangkan untuk mengantisipasi risiko bencana besar seperti gempa bumi dan tsunami, maka kombinasi antara penyiapan dana siaga yang diakumulasi dari pencadangan dari anggaran secara rutin (dan dikelola di luar anggaran), serta adanya penggunaan sumber pembiayaan bencana diluar anggaran seperti skema asuransi bencana menjadi sesuatu yang sangat penting.

Shah (2020:abstrak), menunjukkan bahwa otoritas manajemen bencana mengalami tumpang tindih yurisdiksi, duplikasi tanggung jawab, kurangnya sumber daya anggaran dan non anggaran, dan koordinasi di semua tingkatan. Instrument hukum dan kebijakan terkait bencana masih terbatas dalam penegakannya. Sindrom ketergantungan ada di ketiga tingkatan mekanisme kelembagaan dan pengarusutamaan PRB ke dalam pembangunan kurang dihargai di banyak proyek pembangunan.

Aspek Pengembangan Kapasitas

Untuk aspek pengembangan kapasitas seperti terlihat pada tabel tersebut di atas pada umumnya belum juga berjalan. Pada banyak wilayah aspek pengembangan kapasitas ini banyak diisi dengan kegiatan penguatan ketrampilan serta penguatan emotional question. Hal ini tentu dikaitkan dengan tujuan dari program ini yaitu dipersiapkan untuk dapat melakukan penanganan jika sewaktu-waktu dibutuhkan jika terjadi musibah, baik itu terjadi di lingkungan masyarakat sendiri maupun di lingkungan lainnya yang dapat dilakukan mobilisasi ke wilayah tersebut. Untuk penguatan ketrampilan tentu dikaitkan dengan pemantapan fisik dan berbagai kegiatan kemanusiaan untuk penanganan korban, penanganan llogistik maupun penanganan daerah bencana. Sementara itu, untuk program penguatan emotional question diberikan untuk penguatan mental, kerja sama tim, dan kepercayaan diri para peserta, serta penguatan rasa empathy terhadap sesama manusia.

Delima dan Putra (2021:63), mengungkapkan bahwa penanganan bencana memerlukan kesiapan sumber daya manusia yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Kesiapan dari segi kuantitasnya dapat dilihat dari jumlah sumber daya manusia yang ada. Sedangkan dari segi kualitas dilihat dari kompetensi dan pelatihan yang pernah diikuti. Selanjutnya hal yang sama juga disampaikan oleh Penelitian Ismunandar (2013) dalam Delima dan Putra (2021:63), bahwa penanganan bencana memerlukan SDM yang memadai baik dari segi jumlah maupun kompetensi dan kemampuannya dengan tingkat jenis bencana yang dihadapi. Untuk itu pihak yang manajemen atau pimpinan tertinggi harus menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk mengelola bencana di lingkungan masing-masing.

Lebih jauh Anggun, Putera, dan Liesmana (2020:127) menyatakan bahwa kapasitas merupakan Kapasitas merupakan sumberdaya atau kemampuan yang dimiliki oleh individu, kelompok ataupun lembaga sebagai upaya kesiapan, pencegahan dan pengurangan risiko bencana. Bahkan lebih lanjut Susilowati dan Siswanta (2016:42) menegaskan bahwa Peningkatan kapasitas terhadap kaum perempuan merupakan kegiatan yang mutlak dilakukan. Keberhasilan program mitigasi berbasis kepada masyarakat sangat ditentukan oleh keterlibatan perempuan. Perempuan terutama ibu-ibu adalah pihak yang lebih sering berada di rumah dibanding dengan laki-laki.

Susilowati dan Siswanta (2016:47) Dampak dari kegiatan pengabdian ini adalah meningkatnya pengetahuan, keterampilan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana gempa bumi yang mendorong kesadaran warga untuk ikut berpartisipasi aktif dalam manajemen atau

pengelolaan bencana. Masyarakat memiliki kapasitas untuk meningkatkan peran sertanya dalam penanggulangan bencana (pra, saat dan pasca).

Riset lainnya adalah yaitu pada orang Tionghoa menunjukkan kekuatan tingkat solidaritas komunitas untuk orang-orang yang terkena dampak di Wuhan. Tidak hanya mereka yang menyediakan sumber daya, termasuk keuangan, sumber daya manusia, mereka juga membantu meningkatkan moral para petugas kesehatan garis depan, dan berbagi cerita dan pengalaman positif yang berbeda melalui social media, (Shaw; Kim; Hua : 2020:10).

Meskipun melalui hasil riset yang dilakukan oleh Boas (2020:7) menguraikan hasil penelitiannya bahwa dalam situasi bencana, warga kota China menggunakan dan menghargai sumber informasi tradisional dari pada media social. Bahkan dalam penggunaan media social, informasi yang dibagikan masih terutama diambil dari sumber informasi resmi (misalnya prakiraan cuaca) atau laporan media. Analisis blog media social memberikan gambaran serupa. Mayoritas postingan menganalisis informasi yang diuraikan atau diteruskan dari sumber resmi pemerintah atau media arus utama. Selanjutnya, Carter et all (2020: 9-10), terkait factor terakhir yang perlu dipertimbangkan adalah sejauh mana orang akan benar-benar dapat menggunakan pengetahuan tambahan yang mereka peroleh dari kampanye informasi pra-insiden dalam kejadian nyata sejauh mana rasa takut dan kecemasan yang dialami selama insiden tersebut melebihi manfaat yang terkait dengan peningkatan pra insiden.

Aspek Penanggulangan Bencana

Selanjutnya pada aspek penanggulangan bencana yang terkait dengan pandemic covid 19 ini, hamper semuanya diserahkan kepada tim gugus yang dibentuk oleh pemerintah. Hal ini yang menyebabkan banyak informasi yang tidak dapat disampaikan secara sempurna dari tim kepada masyarakat. Pada sisi yang lain juga ada sumber-sumber berita yang juga dikunsumsi secara luas oleh masyarakat. Akibatnya adalah masyarakat sulit untuk dapat membedakan informasi yang benar. Pada akhirnya adalah masyarakat memiliki pemahaman yang bias. Kondisi ini membuat perspektif masyarakat banyak bertentangan dengan tim penanganan di lapangan. Ujungnya sering terjadi konflik dan benturan.

Nasrullah, Paripurno, dan Prasetyo (2021:28), bahwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 pasal 26 ayat 2 menyatakan bahwa setiap orang yang menjadi korban bencana berhak mendapatkan bantuan dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan pasal 28 ayat 1 bahwa bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 2, diberikan kepada korban bencana dalam bentuk penampungan sementara, bantuan pangan, sandan, air bersih, sanitasi dan pelayanan kesehatan.

Widayatun dan Fatoni (2013:41) menyatakan bahwa Pemherian pelayanan kesehatan pada kondisi hencana sering tidak memadai. Hal ini terjadi antara lain akibat rusaknya fasilitas kesehatan, tidak memadainya jumlah dan jenis ohat serta alat kesehatan, terbatasnya tenaga kesehatan, terbatasnya dana operasional pelayanan di lapangan.

Selain itu, Peng *et all* (2020:abstrak) mengungkapkan bahwa kepercayaan antar pribadi memainkan peran penting di dalam memotivasi *participation community based disaster management*. Kepercayaan institusional dapat meningkatkan partisipasi dengan meningkatkan keterikan tempat. Kemanjuran dirio dan identitas perempuan memperkuat hubungan antar kepercayaan interpersonal dan PCBDM.

Meskipun terdapat bukti yang jelas tentang pemberdayaan perempuan dan peningkatan kapasitas, keberlanjutan inisiatif sangat bergantung kepada komitmen pemerintah daerah untuk memasukkan inisiatif ke dalam kebijakan dan tindakan local. Masih ada kesenjangan antara aspirasi untuk mempraktikkan pemberdayaan perempuan dan implementasinya, Ruszczyk (2020: abstrak).

Meskipun demikian, Puspasari (2017:154) mengungkapkan bahwa Beberapa kendala yang dialami PMI, kendala teknis, yaitu sulitnya komunikasi dan koordinasi terutama jika bencana alam

terjadi di daerah kepulauan. Lebih lanjut tentang kordinasi tersebut disampaikan oleh Bakti dan Fadlurrahman (2020 : 176 – 177) Pada koordinasi vertikal terjadi kegiatan penyatuan dan pengarahan yang diberikan oleh atasan kepada unit-unit dan kesatuan-kesatuan kerja yang berada di bawah wewenang dan tanggung jawab suatu lembaga pemerintah yang memiliki tingkatan tertentu. Sementara itu, Selanjutnya, koordinasi horizontal yang dilakukan BPBD Kabupaten Purworejo pada saat penanggulangan bencana dilaksanakan dengan melibatkan lembaga/ instansi setingkat yang memiliki kewajiban yang sama dalam tugas kebencanaan, misalnya TNI, POLRI, PMI, LSM, dan OPD yang ada di Kabupaten Purworejo.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tingkat ketangguhan bencana Kelurahan Kastela tergolong masih sangat rendah sehingga belum masuk kepada kategori pratama. Hal ini karena hamper semua aspek yang diukur belum terpenuhi.
2. Salah satu aspek yang sangat penting yakni legislasi dinilai oleh responden bahkan dipersepsi sama sekali belum dilakukan apa pun pada semua item yang diukur sehingga diberikan nilai 0. Padahal pada aspek ini dianggap sebagai salah satu dasar untuk melakukan aspek lainnya.
3. Aspek yang lainnya juga terkategori sangat rendah bahkan beberapa aspek juga oleh responden secara tegas diberikan nilai 0, artinya bahwa pemerintah di tingkat Kelurahan Kastela belum melakukan apapun juga.
4. Tingkat ketangguhan Kelurahan Kastela yang belum baik tersebut berdampak terhadap penanganan Covid 19 banyak menghadapi permasalahan di lapangan. Bahkan hingga pada saat ini di tahun kedua pandemic ini belum dapat berjalan dengan baik. Seperti pada program vaksinasi yang belum berjalan sesuai dengan target pemerintah.

SARAN

Berdasarkan pada kesimpulan tersebut, dapat berikan saran sebagai sebuah rekomendasi yang dapat diajukan kepada para pihak yang terkait dengan penanganan bencana, adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kelurahan Kastela perlu menjadikan pembangunan tingkat ketangguhan bencana sebagai sebuah prioritas mengingat ada berbagai potensi bencana yang mengancam wilayah ini.
2. Untuk enam (6) aspek yang dijadikan sebagai indicator pengukuran tingkat ketangguhan perlu dilakukan pembenahan secara baik dan sistematis. Yakni perlu dilakukan dari tahapan yang paling dasar yaitu penyusunan aspek legislasi yang baik dan selanjutnya pada aspek perencanaan dan seterusnya.
3. Masyarakat di tingkat kelurahan sebagai stakeholder dan subjek dari pembangunan harus dilibatkan secara penuh, termasuk juga di dalam hal penanganan bencana. Dengan demikian tingkat tanggung jawab masyarakat akan semakin tinggi dan akan dapat mendorong partisipasi masyarakat secara langsung untuk dapat terlibat di dalamnya menyukkseskannya.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Alifa, Syadza; Wibowo, Arif. 2015. Peran Kelompok Rentan dalam Penanggulangan Bencana Dan Pengurangan Resiko Bencana di Desa Tangguh Bencana (Studi Deskriptif Satuan Tugas Desa Tangguh Bencana di Desa Gunung Geulis, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor). *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*. Jilid 16, Nomor 1, April 2015, 16-32.
- Anggun, T., Putera, R. E., & Liesmana, R. (2020). Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Risiko Bencana Banjir di Kecamatan Padang Selatan. *JDKP Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik*, 1(2), 123–137. <https://doi.org/10.30656/jdkp.v1i2.2415>
- Arikunto, S. 2002. *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

- Bakti, V. A., & Fadlurrahman, F. (2020). Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Menanggulangi Bencana di Kabupaten Purworejo. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 11(2), 171–183. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v11i2.1594>
- Buchari, R. A. (2020). *Manajemen Mitigasi Bencana dengan Kelembagaan Masyarakat di Daerah Rawan Bencana Kabupaten Garut Indonesia*. 1(24), 1–10.
- Delima, M., & Putra, A. Y. M. (2021). Hospital Disaster Plan Dalam Perencanaan Kesiapsiagaan Bencana. *JURNAL KESEHATAN PERINTIS (Perintis's Health Journal)*, 8(1), 54–66. <https://doi.org/10.33653/jkp.v8i1.600>
- Fitri Susilowati, F., & Lilik Siswanta.SE.MM, F. (2016). Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dalam Menghadapi Risiko Bencana Berbasis Gender. *SEMAR (Jurnal Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Dan Seni Bagi Masyarakat)*, 5(1), 41–49. <https://doi.org/10.20961/semar.v5i1.19850>
- Hidayati, Deny. 2008. Kesiapsiagaan Masyarakat: Paradigma BARU Pengelolaan Bencana Alam di Indonesia. *Jurnal Kependudukan Indonesia*. Vol. III. No. 1. 69 – 84.
- Kusumasari, Bevaola. 2014. *Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal*. Yogyakarta : Gava Media
- Mojtaba Valibeigi¹ Majid Feshari² Fatemeh Zivari¹ Artemis Motamedi. 2019. How to improve public participation in disaster risk management: A case study of Buein Zahra, a small city in Iran. *Jamba - Journal of Disaster Risk Studies* ISSN: (Online) 2072-845X, (Print) 1996-1421.
- Montes, Omar Yassef Antunes; Buonsensu, Danilo; Ortega, Sergio Omar Paz. 2020. Rationale For The Routine Application of Lung Ultrasound In The Manajement of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Patients In The Middle To Low Income Countries. *Ultrasound in Med. & Biol.*, Vol. 46, N0.9 pp 2572 – 2574.
- Nasrullah, E. T. P., & Prasetyo, J. D. (2021). Pengelolaan bantuan logistik bencana banjir : studi kasus tanggap darurat bencana di kota kendari tahun 2017. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 2(07), 25–38.
- Nasution, M. Syafii. 2005. *Penanggulangan Bencana Berbasis Komunitas : Studi Kasus Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Komunitas Daerah Rawan Bencana Alam Tanah Longsor Di Desa Kidangpananjung Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Jawa Barat. Bogor.*
- Panorama, A. D., Nastiti, N. N., & Anfasa, F. A. (2021). Kerja Sama Pengurangan Risiko Bencana Indonesia Australia 2016-2018. *Jurnal Academia Praja*, 4(1), 223–243. <https://doi.org/10.36859/jap.v4i1.290>
- Pradana, Y. A. 2012. *Studi Ketahanan Masyarakat Pesisir Pacitan Terhadap Bencana Tsunami*. Surabaya: POMITS.
- Pradika, M. I., Giyarsih, S. R., & Hartono, H. (2018). Peran Pemuda Dalam Pengurangan Risiko Bencana Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 24(2), 261. <https://doi.org/10.22146/jkn.35311>
- Priambodo, Arie. 2013. *Panduan Praktis Menghadapi Bencana*. Yogyakarta: Kanisius
- Puspasari, H. (2017). Peran Palang Merah Indonesia Terhadap Penanggulangan Dampak Bencana Alam di Indonesia. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 20(4), 149–155. <https://ejournal2.litbang.kemkes.go.id/index.php/hsr/article/view/76>
- Putera, E., Publik, A., Andalas, U., & Padang, K. (2020). *Mitigasi Bencana Dalam Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Ancaman Gempa Bumi Di Universitas Andalas menghasilkan Kerangka Kerja Sendai Kerangka Kerja Sendai adalah tentang kesiapsiagaan Hasil penelitian Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IAKI) juga satu k. 08(02), 81–90.*

- Rahman, A. Z. (2017). Kapasitas Daerah Banjarnegara dalam Penanggulangan Bencana Alam Tanah Longsor. *Jurnal Ilmu Sosial*, 16(1), 1–8.
- Sadat, A. (2019). Intergovernmental Dalam Penanganan Bencana Alam Di Pemerintahan Daerah. *Kybernan: Jurnal Studi Pemerintahan*, 4(1), 66–81. <https://doi.org/10.35326/kybernan.v4i1.312>
- Surono. 2003. Potensi Bencana Geologi di Kabupaten Garut. Prosiding Semiloka Mitigasi Bencana Longsor di Kabupaten Garut. Garut: Pemerintah Kabupaten Garut.
- Widayatun, & Fatoni, Z. (2013). Permasalahan Kesehatan dalam Kondisi Bencana: Peran Petugas Kesehatan dan Partisipasi Masyarakat (Health Problems in a Disaster Situation : the Role of Health Personnels and Community Participation). *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 8(1), 37–52. <https://ejurnal.kependudukan.lipi.go.id/index.php/jki/article/download/21/15>
- Z, W. Guan, et all. 2020. Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 2019 in China. *The New England Journal of Medicine*.